
**PERAN TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENGUATAN TATA KELOLA
ADMINISTRASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUWANGI: KAJIAN PRINSIP
AMANAH DAN MASLAHAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

¹Sandika Darma W.P, ²Ahmat Gilman Huda, ³Ibnu Dian Avin Nur
^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email: ¹sandikadarma14@gmail.com, ²ahmatgilman57@gmail.com,
³ibnudianalvinnur@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

*Transformasi
Digital; Tata Kelola;
Amanah; Masalah.*

Cara Sitasi:

Penulis, Sandika
Darma W.P “Peran
Transformasi
Digital dalam
Penguatan Tata
Kelola Administrasi
Sekretariat KPU
Kabupaten
Banyuwangi: Kajian
Prinsip Amanah
dan Masalah
dalam Perspektif
Ekonomi Syariah
.” Currency:
Jurnal Ekonomi dan
Perbankan Syariah
[Volume 05, Nomor
01](#) Agustus 2026

ABSTRAK

Transformasi digital menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola administrasi pada organisasi publik, termasuk Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transformasi digital dalam penguatan tata kelola administrasi Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan perspektif prinsip amanah dan masalah dalam ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital telah mendorong perubahan pola kerja administrasi melalui pemanfaatan berbagai teknologi digital. Aplikasi E- PRESENSI dan E-KINERJA menjadi contoh implementasi digitalisasi yang mendukung pengelolaan informasi, dokumentasi, dan pelaksanaan pekerjaan administrasi secara lebih terstruktur. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam mengintegrasikan teknologi dengan prosedur dan tanggung jawab kelembagaan. Dalam perspektif amanah, transformasi digital tercermin melalui peningkatan tanggung jawab, kejujuran, kepercayaan, dan kepatuhan dalam pengelolaan administrasi. Sementara itu, perspektif masalah terlihat dari manfaat teknologi berupa kemudahan, efisiensi, dan dukungan terhadap peningkatan kualitas tata kelola administrasi. Efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas menjadi indikator pendukung dalam melihat penguatan tata kelola. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam administrasi publik perlu diarahkan tidak hanya pada pencapaian efisiensi teknis, tetapi juga pada penerapan nilai amanah dan penciptaan kemaslahatan, sehingga mampu menghasilkan tata kelola

administrasi yang lebih tertib, bertanggung jawab, dan berkualitas.

Digital transformation has become an important component in strengthening administrative governance within public organizations, including the Secretariat of the General Elections Commission (KPU) of Banyuwangi Regency. This study aims to analyze the role of digital transformation in strengthening administrative governance at the Banyuwangi Regency KPU Secretariat from the perspective of amanah and masalah principles in Islamic economics. This study employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with administrative personnel at the Banyuwangi Regency KPU Secretariat, observations, and documentation. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that digital transformation has encouraged changes in administrative work patterns through the utilization of various digital technologies. E- PRESENSI dan E-KINERJA Application serve as examples of digital implementation that supports information management, documentation, and administrative activities in a more structured manner. However, the success of digital transformation is not determined solely by the availability and use of technology, but also by the ability of personnel to integrate technology with institutional procedures and responsibilities. From the perspective of amanah, digital transformation is reflected in greater responsibility, honesty, trustworthiness, and compliance in administrative management. Meanwhile, the masalah perspective is reflected in the benefits of technology, including convenience, efficiency, and support for improving the quality of administrative governance. Effectiveness, transparency, and accountability serve as supporting indicators in assessing the strengthening of governance. This study emphasizes that digital transformation in public administration should not focus solely on achieving technical efficiency but also on implementing the values of amanah and creating masalah, thereby contributing to more orderly, responsible, beneficial, and high-quality administrative governance.

Pendahuluan

Transformasi digital telah menjadi bagian penting dalam perubahan tata kelola organisasi publik (Ramadhani, 2026). Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mengubah cara organisasi mengelola data dan informasi, tetapi juga mendorong perubahan dalam proses kerja, koordinasi, dokumentasi, dan pelaksanaan administrasi.

Dalam sektor publik, transformasi digital diperlukan untuk membangun proses kerja yang lebih efektif, efisien, terstruktur, dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan teknologi. Digitalisasi juga semakin penting karena lembaga publik dituntut untuk menyelenggarakan administrasi yang tertib, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan dukungan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat (Nang et al., 2025).

Transformasi digital pada dasarnya tidak dapat dipahami hanya sebagai penggunaan aplikasi atau perangkat teknologi. Transformasi digital merupakan proses perubahan organisasi yang melibatkan teknologi, sumber daya manusia, proses kerja, serta budaya organisasi (Setianingrum et al., 2024). Penggunaan teknologi baru akan memberikan nilai apabila mampu memperbaiki cara kerja dan menghasilkan manfaat nyata bagi organisasi. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital dalam sektor publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam menggunakannya secara tepat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Putri, 2026).

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tata kelola administrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu membutuhkan sistem administrasi yang tertib untuk mendukung pengelolaan data, dokumen, informasi, sumber daya, serta berbagai aktivitas kelembagaan. Sekretariat KPU memiliki fungsi penting dalam memberikan dukungan administratif dan operasional terhadap pelaksanaan tugas KPU. Oleh karena itu, penguatan tata kelola administrasi melalui pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu kebutuhan dalam menghadapi tuntutan organisasi publik yang semakin kompleks (Azhar et al., 2026).

Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu lingkungan kelembagaan yang dalam pelaksanaan administrasinya memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung berbagai aktivitas organisasi. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat membantu proses pengelolaan informasi, dokumentasi, pencatatan, koordinasi, dan pekerjaan administratif lainnya. Keberadaan berbagai sistem digital menunjukkan bahwa proses administrasi mulai mengalami pergeseran dari mekanisme yang sepenuhnya manual menuju pola kerja yang memanfaatkan teknologi. Perubahan tersebut menjadi bagian dari proses transformasi digital yang berpotensi memperkuat tata kelola administrasi apabila didukung oleh sumber daya manusia, prosedur, dan budaya kerja yang sesuai.

Salah satu bentuk implementasi teknologi digital dalam lingkungan administrasi KPU Kabupaten Banyuwangi adalah penggunaan E-PRESENSI. Selain itu, terdapat pula E-KINERJA yang menjadi bagian dari pemanfaatan teknologi dalam mendukung aktivitas administrasi. Keberadaan aplikasi E- PRESENSI dan E-KINERJA dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai objek utama atau fokus evaluasi aplikasi, melainkan sebagai contoh nyata implementasi transformasi digital yang berlangsung di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian, kedua teknologi tersebut digunakan untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana transformasi digital diterapkan dalam aktivitas administrasi, sedangkan fokus utama penelitian tetap diarahkan pada hubungan antara transformasi digital dan penguatan tata kelola administrasi.

Pemanfaatan teknologi digital dapat memberikan berbagai manfaat terhadap tata kelola administrasi (Hamim & Hafis, 2026). Proses kerja dapat menjadi lebih terstruktur, pengelolaan informasi lebih mudah dilakukan, serta dokumentasi

administrasi dapat disimpan dan ditelusuri secara lebih sistematis (Febriansyah & Husnayanti, 2024). Digitalisasi juga berpotensi mengurangi pekerjaan administratif yang berulang dan membantu aparatur menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Dari sisi tata kelola, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dapat menjadi indikator pendukung untuk melihat kontribusi transformasi digital. Namun, ketiga aspek tersebut bukan menjadi perspektif utama dalam penelitian ini karena kualitas tata kelola juga sangat ditentukan oleh nilai dan perilaku aparatur dalam menggunakan teknologi (Rahmawanti et al., 2026).

Persoalan tersebut menjadi penting karena teknologi digital pada dasarnya merupakan instrumen yang penggunaannya sangat bergantung pada manusia. Sistem digital yang baik tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola yang baik apabila pengguna tidak memiliki tanggung jawab, kejujuran, kepatuhan, dan kesadaran terhadap kepentingan organisasi (Febrina & Manurung, 2022). Pengelolaan data dan informasi melalui teknologi membutuhkan kehati-hatian serta tanggung jawab agar informasi yang dihasilkan tetap akurat dan dapat dipercaya. Demikian pula, penggunaan sistem digital harus dilakukan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku agar teknologi benar-benar mendukung tujuan organisasi (Rezkiawan et al., 2026).

Perspektif ekonomi syariah memberikan kerangka yang relevan untuk memahami dimensi nilai dalam transformasi digital tersebut (Karimah et al., 2025). Salah satu prinsip utama yang dapat digunakan adalah amanah. Amanah mengandung makna tanggung jawab dalam menjalankan sesuatu yang dipercayakan serta kewajiban untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks administrasi publik, prinsip amanah dapat diwujudkan melalui tanggung jawab aparatur terhadap pekerjaan, kejujuran dalam pengelolaan data dan informasi, kepatuhan terhadap prosedur, serta kemampuan menjaga kepercayaan organisasi dan masyarakat (Sudirjo et al., 2023).

Penerapan prinsip amanah dalam transformasi digital berarti bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tujuan kelembagaan (Kurniawan & Korib, 2026). Aparatur tidak hanya dituntut mampu mengoperasikan sistem, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi yang dimasukkan dan dikelola benar, kewenangan digunakan secara tepat, dan prosedur administrasi dipatuhi. Dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi sarana untuk memperkuat budaya administrasi yang bertanggung jawab apabila penggunaannya didasarkan pada nilai amanah (Mujalipah & Hidayat, 2025).

Selain amanah, prinsip masalah menjadi perspektif penting dalam menilai manfaat transformasi digital. Masalah mengarah pada terciptanya kemanfaatan dan kebaikan serta terhindarnya suatu aktivitas dari kemudaran. Dalam konteks administrasi organisasi publik, penerapan teknologi dapat dikatakan memiliki nilai masalah apabila memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan pekerjaan, menciptakan kemudahan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak cukup dilihat dari seberapa banyak aplikasi digunakan, tetapi dari sejauh mana teknologi tersebut menghasilkan manfaat bagi organisasi dan pihak yang berkepentingan (Hana & Prabowo, 2025).

Keterkaitan antara transformasi digital, tata kelola administrasi, amanah, dan masalah menjadi penting untuk dikaji dalam konteks Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Transformasi digital memberikan sarana untuk memperbaiki proses kerja, sedangkan tata kelola administrasi merupakan ruang tempat perubahan tersebut

diwujudkan. Sementara itu, amanah memberikan landasan mengenai bagaimana teknologi digunakan secara bertanggung jawab, sedangkan masalah memberikan orientasi bahwa pemanfaatan teknologi harus menghasilkan manfaat dan kemudahan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya dipandang sebagai perubahan teknis, tetapi juga sebagai proses yang memiliki dimensi etis dan kemanfaatan.

Kajian mengenai transformasi digital sektor publik selama ini banyak diarahkan pada persoalan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan, dan kesiapan organisasi dalam mengadopsi teknologi. Sementara itu, kajian ekonomi syariah mengenai tata kelola lebih banyak menempatkan amanah dan masalah sebagai prinsip etis dalam pengelolaan organisasi dan sumber daya. Masih terdapat ruang untuk mengintegrasikan kedua perspektif tersebut dalam mengkaji transformasi digital pada lingkungan administrasi lembaga publik, khususnya pada Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Kesenjangan tersebut menjadi dasar pentingnya penelitian yang melihat transformasi digital tidak hanya dari sisi teknis dan administratif, tetapi juga dari sisi nilai amanah dan kemanfaatan.

Penelitian pada Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi menjadi sesuai karena transformasi digital dalam administrasi berlangsung dalam lingkungan kelembagaan yang membutuhkan ketepatan pengelolaan informasi, kepatuhan terhadap prosedur, tanggung jawab aparatur, dan kualitas dokumentasi. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi E-PRESENSI dan E-KINERJA memberikan gambaran konkret mengenai implementasi digitalisasi dalam aktivitas administrasi. Namun, keberadaan teknologi tersebut perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana transformasi digital berkontribusi terhadap penguatan tata kelola dan bagaimana penggunaannya dapat mencerminkan nilai-nilai ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transformasi digital dalam penguatan tata kelola administrasi Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan perspektif prinsip amanah dan masalah dalam ekonomi syariah. Transformasi digital menjadi fokus utama penelitian, sedangkan aplikasi E-PRESENSI dan E-KINERJA digunakan sebagai contoh implementasi teknologi digital dalam aktivitas administrasi. Analisis diarahkan pada bagaimana pemanfaatan teknologi mendukung penguatan tata kelola administrasi serta bagaimana proses tersebut mencerminkan prinsip amanah melalui tanggung jawab, kejujuran, kepercayaan, dan kepatuhan, serta prinsip masalah melalui kemanfaatan, kemudahan, efisiensi, dan peningkatan kualitas tata kelola. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperluas kajian ekonomi syariah pada tata kelola organisasi publik sekaligus memberikan pemahaman praktis mengenai pentingnya mengintegrasikan transformasi digital dengan nilai amanah dan masalah dalam pengelolaan administrasi kelembagaan.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

1. Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan proses perubahan organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital yang memengaruhi proses kerja, pengelolaan informasi, komunikasi, koordinasi, serta cara organisasi menciptakan dan memberikan nilai (Musari, K. 2020). Transformasi digital memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan digitalisasi karena tidak hanya mengubah informasi atau dokumen dari bentuk manual menjadi digital, tetapi juga mendorong perubahan terhadap mekanisme kerja dan pengelolaan organisasi (Siahaan & Sitompul, 2021).

Dalam sektor publik, transformasi digital menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kapasitas organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan dan tuntutan masyarakat. Pemanfaatan teknologi memungkinkan organisasi publik melakukan pengelolaan informasi secara lebih cepat, sistematis, dan terintegrasi. Transformasi tersebut juga dapat mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan administrasi dengan menyediakan informasi yang lebih mudah diakses dan dikelola (Mardiah & Anugrah, 2020).

Namun, transformasi digital tidak dapat dipisahkan dari kesiapan sumber daya manusia dan organisasi. Keberadaan teknologi tidak secara otomatis menghasilkan perubahan positif apabila aparatur tidak mampu menggunakannya atau tidak memiliki komitmen untuk menjalankan proses digital sesuai prosedur. Oleh sebab itu, transformasi digital perlu dipahami sebagai proses perubahan organisasi yang mengintegrasikan teknologi dengan sumber daya manusia, prosedur kerja, dan budaya organisasi.

Dalam penelitian ini, transformasi digital dipahami sebagai proses pemanfaatan teknologi dalam mendukung perubahan dan penguatan tata kelola administrasi di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Aplikasi E- PRESENSI dan E-KINERJA ditempatkan sebagai contoh implementasi teknologi digital yang membantu menggambarkan proses tersebut, bukan sebagai fokus utama penelitian.

2. Tata Kelola Administrasi

Tata kelola administrasi berkaitan dengan bagaimana organisasi mengatur, melaksanakan, mendokumentasikan, dan mempertanggungjawabkan berbagai aktivitas administratif. Dalam organisasi publik, tata kelola administrasi memiliki peran penting karena menjadi fondasi dalam memastikan pelaksanaan tugas berjalan berdasarkan prosedur dan tujuan kelembagaan (Sungkar et al., 2025).

Tata kelola administrasi yang baik membutuhkan proses kerja yang terstruktur, pengelolaan informasi yang tepat, pembagian tugas yang jelas, dokumentasi yang memadai, serta kepatuhan terhadap ketentuan. Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi instrumen yang membantu organisasi meningkatkan kualitas proses tersebut.

Digitalisasi administrasi memungkinkan informasi dikelola secara lebih sistematis dan terdokumentasi. Proses pencatatan dan pengolahan informasi juga dapat dilakukan dengan lebih cepat sehingga mendukung efektivitas pekerjaan. Selain itu, dokumentasi digital dapat membantu proses penelusuran informasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi (Sri Dwi Puji Lestari et al., 2025).

Efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dapat digunakan sebagai indikator pendukung dalam melihat penguatan tata kelola administrasi. Namun, penelitian ini tidak menempatkan ketiga aspek tersebut sebagai perspektif utama. Fokus utama diarahkan pada bagaimana tata kelola administrasi yang didukung transformasi digital dapat dianalisis berdasarkan prinsip amanah dan masalah.

3. Transformasi Digital dalam Administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum membutuhkan dukungan administrasi yang tertib dan terorganisasi dalam menjalankan tugas kelembagaannya. Aktivitas administrasi KPU berkaitan dengan pengelolaan data, dokumen, informasi, sumber daya, serta koordinasi berbagai kegiatan. Kompleksitas tersebut menyebabkan pemanfaatan teknologi digital menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Sekretariat KPU memiliki fungsi dalam memberikan dukungan administratif dan operasional terhadap pelaksanaan tugas KPU. Pemanfaatan teknologi dalam lingkungan sekretariat dapat membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi pekerjaan manual, meningkatkan keteraturan dokumentasi, serta memudahkan pengelolaan informasi (Arfi et al., 2025).

Dalam konteks Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, penggunaan berbagai teknologi digital merupakan bagian dari proses adaptasi organisasi terhadap perkembangan teknologi. Aplikasi E-PRESENSI dan E-KINERJA merupakan contoh implementasi teknologi digital yang dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana digitalisasi diterapkan dalam aktivitas administrasi.

Meskipun demikian, penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur efektivitas atau mengevaluasi fitur masing-masing aplikasi. Kedua aplikasi tersebut hanya digunakan sebagai contoh empiris untuk memahami transformasi digital secara lebih luas. Fokus penelitian tetap diarahkan pada proses transformasi digital dan kontribusinya terhadap penguatan tata kelola administrasi.

4. Prinsip Amanah dalam Ekonomi Syariah

Amanah merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi syariah yang menekankan tanggung jawab, kejujuran, dan kemampuan menjaga sesuatu yang dipercayakan (Sofiah, S. 2018). Amanah tidak hanya berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lainnya, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan mengelola sumber daya yang menjadi kewenangan seseorang (Pranata & Amaranti, 2021).

Dalam organisasi publik, prinsip amanah memiliki relevansi yang kuat karena aparatur diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas yang berkaitan dengan kepentingan organisasi dan masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut menuntut adanya tanggung jawab, integritas, kepatuhan, serta komitmen untuk menjaga kepercayaan (Rahman et al., 2021).

Dalam konteks transformasi digital, amanah berkaitan dengan bagaimana aparatur menggunakan teknologi dan mengelola data atau informasi. Penggunaan sistem digital harus dilakukan sesuai kewenangan, prosedur, dan tujuan organisasi. Data yang dimasukkan ke dalam sistem harus sesuai dengan kondisi sebenarnya dan informasi yang dikelola harus dijaga dari penyalahgunaan (Kariuki et al., 2025).

Berdasarkan perspektif tersebut, prinsip amanah dalam penelitian ini dianalisis melalui empat aspek utama (Okumus, 2024):

- a. Tanggung jawab, yaitu kesungguhan aparatur dalam melaksanakan tugas dan mengelola sistem digital.
- b. Kejujuran, yaitu kebenaran dan ketepatan data serta informasi yang dikelola.
- c. Kepercayaan, yaitu kemampuan menjaga kepercayaan organisasi dan pihak yang berkepentingan.
- d. Kepatuhan, yaitu kesesuaian pelaksanaan administrasi dan penggunaan teknologi dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku.

Keempat aspek tersebut menjadi dasar untuk menganalisis apakah transformasi digital telah digunakan sebagai instrumen yang mendukung tata kelola administrasi berbasis nilai amanah.

5. Prinsip Maslahah dalam Ekonomi Syariah

Maslahah merupakan konsep yang menekankan terciptanya kemanfaatan dan kebaikan serta pencegahan terhadap kemudharatan (Rahayu, N. W. I., Poernomo, D.,

Mursyidah, I. L., & Jannah, E. S. W. (2024). Dalam aktivitas organisasi, prinsip masalah dapat digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan, proses, atau penggunaan teknologi memberikan manfaat nyata dan mendukung tujuan yang lebih luas (Dwi Cahyani et al., 2022).

Transformasi digital dapat dikaitkan dengan prinsip masalah karena penggunaan teknologi pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas proses kerja (Firdaus, N. S. A., & Fatimatuazzahro, F. (2026). Dalam administrasi publik, teknologi dapat memberikan manfaat melalui percepatan pengelolaan informasi, pengurangan pekerjaan manual, kemudahan akses data, serta peningkatan keteraturan administrasi.

Dalam penelitian ini, prinsip masalah dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu (Rosalina & Majid, 2025):

- a. Kemanfaatan, yaitu manfaat nyata yang dihasilkan transformasi digital bagi pelaksanaan administrasi.
- b. Kemudahan, yaitu sejauh mana teknologi mempermudah aparatur dalam melaksanakan tugas.
- c. Efisiensi, yaitu kemampuan teknologi menghemat waktu, tenaga, dan sumber daya dalam proses administrasi.
- d. Peningkatan kualitas tata kelola, yaitu kontribusi transformasi digital terhadap peningkatan keteraturan, ketepatan, dan kualitas administrasi.

Dengan demikian, masalah tidak hanya dilihat dari keberadaan teknologi, tetapi dari manfaat yang dihasilkan oleh penggunaannya.

6. Transformasi Digital dan Penguatan Tata Kelola Administrasi

Transformasi digital memiliki potensi untuk memperkuat tata kelola administrasi melalui perubahan proses kerja dan pengelolaan informasi. Teknologi dapat membantu organisasi mengurangi ketergantungan pada proses manual, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta meningkatkan keteraturan dokumentasi (Ramadhani Alfin Habibie et al., 2025).

Dalam administrasi publik, proses digital yang dilakukan secara sistematis juga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas. Informasi yang terdokumentasi secara digital relatif lebih mudah ditelusuri sehingga dapat membantu proses pengawasan dan pertanggungjawaban. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan dan kepatuhan aparatur terhadap prosedur (Nang, 2026).

Hubungan antara transformasi digital dan tata kelola administrasi dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai hubungan sebab-akibat secara statistik. Sebaliknya, hubungan tersebut dipahami sebagai proses empiris yang dapat diamati melalui perubahan cara kerja, pemanfaatan teknologi, pengelolaan informasi, serta pelaksanaan prosedur administrasi.

7. Amanah dan Penguatan Tata Kelola Administrasi

Prinsip amanah memberikan dimensi etis dalam penguatan tata kelola administrasi. Tata kelola yang didukung teknologi tidak cukup hanya menghasilkan proses yang cepat dan efisien, tetapi juga harus dilakukan dengan tanggung jawab dan integritas (Dompak et al., 2026).

Dalam konteks Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, pengelolaan data dan informasi melalui teknologi digital menuntut aparatur untuk menjaga keakuratan informasi, mematuhi prosedur, dan menggunakan kewenangan secara tepat.

Penggunaan aplikasi E-PRESENSI dan E-KINERJA dapat mendukung proses tersebut apabila aparatur menggunakannya secara bertanggung jawab.

Dengan demikian, semakin baik penerapan nilai tanggung jawab, kejujuran, kepercayaan, dan kepatuhan dalam penggunaan teknologi, semakin kuat pula dimensi amanah dalam tata kelola administrasi.

8. Masalah dan Penguatan Tata Kelola Administrasi

Prinsip masalah memberikan orientasi bahwa transformasi digital harus menghasilkan manfaat yang nyata. Teknologi yang digunakan dalam administrasi seharusnya tidak hanya menggantikan proses manual, tetapi memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pekerjaan (Amalia, 2024).

Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi E- PRESENSI dan E-KINERJA dapat memberikan manfaat apabila mampu mendukung kebutuhan administrasi organisasi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan, efisiensi proses, keteraturan pengelolaan informasi, serta peningkatan tata kelola.

Dengan demikian, perspektif masalah membantu penelitian untuk melihat transformasi digital dari sisi hasil dan manfaat yang dirasakan oleh organisasi, bukan hanya dari keberadaan teknologi.

9. Pengembangan Proposisi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengembangan hipotesis statistik tidak digunakan. Sebagai gantinya, kajian pustaka menghasilkan beberapa proposisi analitis yang menjadi arah dalam pengumpulan dan analisis data.

Proposisi 1: Transformasi digital berperan dalam mendukung penguatan tata kelola administrasi di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi melalui pemanfaatan teknologi digital dalam proses kerja dan pengelolaan informasi.

Proposisi 2: Pemanfaatan teknologi digital, termasuk aplikasi E- PRESENSI dan E-KINERJA sebagai contoh implementasi, mendukung perubahan proses administrasi menuju pola kerja yang lebih terstruktur dan terdokumentasi.

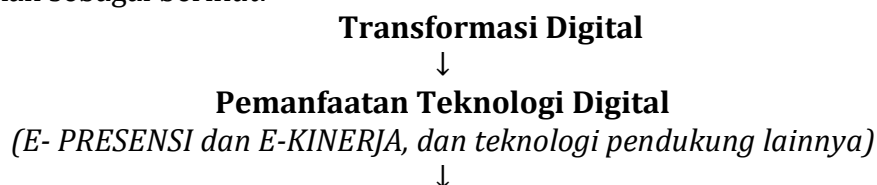
Proposisi 3: Penguatan tata kelola administrasi melalui transformasi digital perlu didukung oleh prinsip amanah yang tercermin dalam tanggung jawab, kejujuran, kepercayaan, dan kepatuhan aparatur.

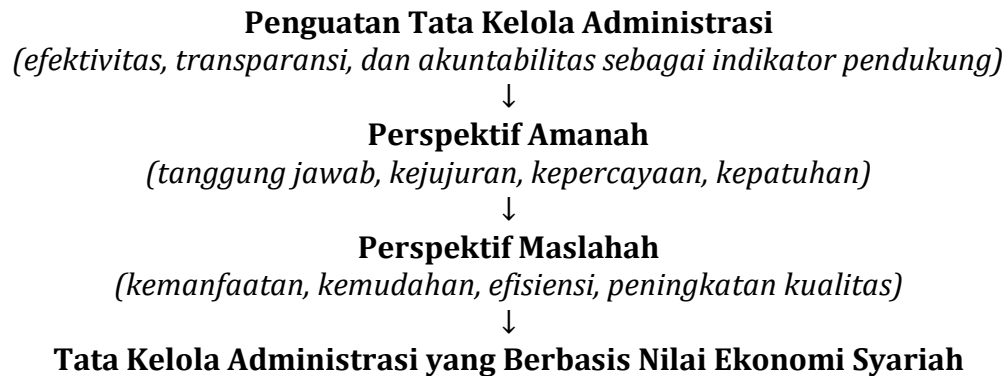
Proposisi 4: Transformasi digital memiliki nilai masalah apabila memberikan kemanfaatan, kemudahan, efisiensi, dan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola administrasi.

Proposisi 5: Penguatan tata kelola administrasi melalui transformasi digital akan lebih bermakna apabila pemanfaatan teknologi tidak hanya berorientasi pada efektivitas teknis, tetapi juga dilandasi nilai amanah dan diarahkan pada terciptanya masalah.

10. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, kerangka konseptual penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:





Kerangka tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital menjadi fokus utama penelitian, sedangkan aplikasi E-PRESENSI dan E-KINERJA hanya ditempatkan sebagai contoh implementasi teknologi digital. Tata kelola administrasi menjadi ruang untuk melihat dampak transformasi tersebut, sementara prinsip amanah dan masalah digunakan sebagai perspektif utama untuk menganalisis kualitas dan orientasi transformasi digital dalam perspektif ekonomi syariah.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran transformasi digital dalam penguatan tata kelola administrasi di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi (Aveling et al., 2015). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap proses, pengalaman, praktik, dan makna yang muncul dalam pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas administrasi. Penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena transformasi digital berdasarkan kondisi empiris di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi.

Perspektif ekonomi syariah digunakan sebagai kerangka analisis dengan menempatkan amanah dan masalah sebagai konsep utama. Prinsip amanah digunakan untuk menganalisis tanggung jawab, kejujuran, kepercayaan, dan kepatuhan aparatur dalam melaksanakan administrasi berbasis digital. Sementara itu, prinsip masalah digunakan untuk menganalisis kemanfaatan, kemudahan, efisiensi, dan kontribusi transformasi digital terhadap peningkatan kualitas tata kelola administrasi.

Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pelaksanaan tugas administrasi kelembagaan.

Fokus penelitian adalah transformasi digital dalam penguatan tata kelola administrasi. Fokus tersebut meliputi:

1. bentuk dan proses transformasi digital dalam administrasi;
2. pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pekerjaan administrasi;
3. perubahan proses kerja setelah pemanfaatan teknologi;
4. kontribusi transformasi digital terhadap tata kelola administrasi;
5. penerapan nilai amanah dalam penggunaan teknologi;
6. penerapan nilai masalah dalam pemanfaatan teknologi; dan
7. kendala serta upaya penguatan transformasi digital.

Aplikasi E-PRESENSI dan E-KINERJA digunakan sebagai contoh implementasi teknologi digital dalam penelitian. Kedua aplikasi tersebut tidak menjadi objek evaluasi tersendiri dan tidak dibandingkan berdasarkan fitur atau performanya. Keduanya digunakan sebagai data pendukung untuk menggambarkan implementasi transformasi digital dalam aktivitas administrasi Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi.

Informan Penelitian

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan administrasi serta pemanfaatan teknologi digital. Informan penelitian dapat terdiri atas:

1. Kasubbag Teknis dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan arah transformasi digital;
2. Kasubbag Perencanaan Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi, untuk memahami proses pengelolaan administrasi dan penerapan prosedur;
3. Pegawai/staf, untuk memperoleh informasi mengenai praktik penggunaan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari;
4. Staf Pelaksana yang menggunakan teknologi digital, termasuk informan yang memiliki pengalaman menggunakan E- PRESENSI dan E-KINERJA sebagai bagian dari aktivitas administrasi.

Pemilihan informan dilakukan berdasarkan kesesuaian terhadap fokus penelitian, bukan semata-mata berdasarkan jabatan. Jumlah informan dapat berkembang selama proses penelitian sesuai kebutuhan data dan prinsip kecukupan informasi.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder (Ishtiaq, 2019). Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap informan serta aktivitas administrasi di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Data primer mencakup informasi mengenai proses transformasi digital, penggunaan teknologi, perubahan proses kerja, manfaat teknologi, kendala implementasi, serta penerapan prinsip amanah dan masalah.

Data sekunder diperoleh melalui dokumen yang relevan dengan penelitian, seperti pedoman administrasi, standar operasional prosedur, dokumen kelembagaan, arsip administrasi, laporan, dokumentasi kegiatan, serta sumber tertulis lain yang mendukung penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Njie & Asimiran, 2014).

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang mendalam namun tetap berada dalam batas fokus penelitian. Wawancara diarahkan untuk menggali informasi mengenai:

- a. bentuk transformasi digital di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi;
- b. teknologi yang digunakan dalam mendukung administrasi;
- c. pemanfaatan E- PRESENSI dan E-KINERJA sebagai contoh implementasi;
- d. perubahan pola dan proses kerja setelah pemanfaatan teknologi;
- e. manfaat teknologi terhadap pelaksanaan administrasi;
- f. kendala dalam penggunaan teknologi;

- g. tanggung jawab aparatur dalam pengelolaan sistem dan data;
- h. kejujuran dan ketepatan informasi administrasi;
- i. kepatuhan terhadap prosedur;
- j. kemudahan dan efisiensi yang dihasilkan teknologi; dan
- k. kontribusi digitalisasi terhadap peningkatan kualitas tata kelola administrasi.

Informasi mengenai aplikasi E- PRESENSI dan E-KINERJA digunakan sebagai bagian dari data empiris mengenai transformasi digital, sehingga wawancara tidak diarahkan hanya pada kedua aplikasi tersebut.

2. Observasi

Observasi dilakukan terhadap aktivitas administrasi dan penggunaan teknologi digital di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Observasi mencakup proses pelaksanaan pekerjaan, penggunaan sistem digital, pengelolaan data dan informasi, penerapan prosedur, serta koordinasi antarpegawai.

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik transformasi digital secara langsung dan membandingkannya dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen administrasi, pedoman kerja, prosedur, arsip, laporan, dan dokumentasi lain yang relevan. Dokumentasi juga digunakan untuk memperkuat informasi mengenai penerapan teknologi digital dan tata kelola administrasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Apriliawati, 2020).

Pada tahap kondensasi data, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian. Data dikategorikan ke dalam tema transformasi digital, tata kelola administrasi, amanah, masalah, serta kendala dan manfaat digitalisasi.

Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil penelitian dalam bentuk uraian deskriptif dan tematik. Data mengenai penggunaan aplikasi E- PRESENSI dan E-KINERJA ditempatkan sebagai bagian dari tema implementasi transformasi digital dan tidak dijadikan fokus pembahasan tersendiri secara dominan.

Selanjutnya, penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola dan hubungan antartemuan. Kesimpulan mengenai peran transformasi digital kemudian dianalisis menggunakan perspektif amanah dan masalah.

Analisis Prinsip Amanah

Analisis amanah digunakan untuk memahami dimensi tanggung jawab dan integritas dalam penggunaan teknologi digital. Prinsip amanah dianalisis melalui empat aspek:

Aspek	Fokus Analisis
-------	----------------

Tanggung jawab	Kesungguhan aparatur dalam menjalankan tugas dan menggunakan teknologi sesuai kewenangan
Kejujuran	Ketepatan dan kebenaran data serta informasi yang dikelola

Kepercayaan	Upaya menjaga kepercayaan organisasi melalui pengelolaan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan
Kepatuhan	Kesesuaian penggunaan teknologi dan pelaksanaan administrasi dengan prosedur dan ketentuan

Analisis ini digunakan untuk melihat apakah transformasi digital mendukung terbentuknya tata kelola administrasi yang dijalankan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai ekonomi syariah.

Analisis Prinsip Masalah

Prinsip masalah digunakan untuk melihat manfaat yang dihasilkan dari transformasi digital. Analisis dilakukan melalui beberapa aspek:

Aspek	Fokus Analisis
<i>Kemanfaatan</i>	Manfaat transformasi digital terhadap pelaksanaan administrasi
<i>Kemudahan</i>	Kemudahan yang dirasakan aparatur dalam menjalankan pekerjaan
<i>Efisiensi</i>	Penghematan waktu, tenaga, dan proses administrasi
<i>Peningkatan kualitas</i>	Kontribusi teknologi terhadap kualitas dan keteraturan tata kelola

Melalui perspektif tersebut, transformasi digital dinilai bukan hanya berdasarkan keberadaan teknologi, tetapi berdasarkan manfaat nyata yang dihasilkan bagi pelaksanaan tugas administrasi.

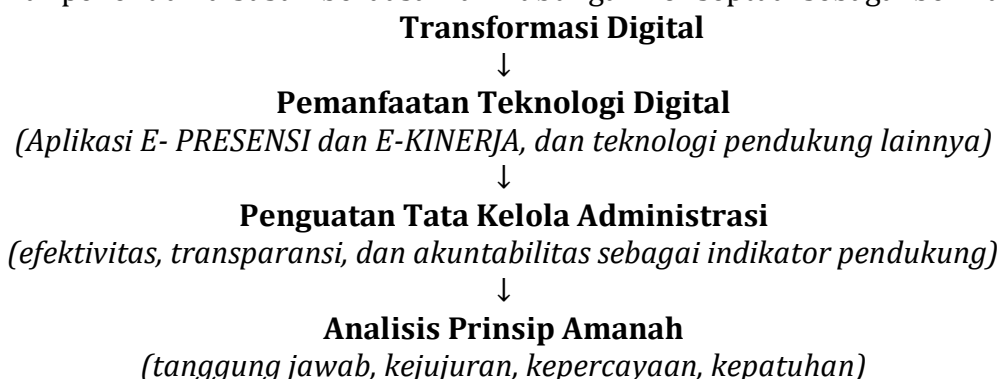
Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan yang memiliki posisi dan pengalaman berbeda dalam pelaksanaan administrasi. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Almalki, 2016).

Data yang diperoleh dari wawancara mengenai transformasi digital, penggunaan aplikasi E-PRESENSI dan E-KINERJA, tata kelola administrasi, amanah, dan masalah dibandingkan dengan hasil observasi serta dokumen yang tersedia. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa temuan penelitian memiliki kredibilitas dan tidak hanya bergantung pada satu sumber informasi.

Alur Penelitian

Alur penelitian disusun berdasarkan hubungan konseptual sebagai berikut:



↓
Analisis Prinsip Masalah
(kemanfaatan, kemudahan, efisiensi, peningkatan kualitas)

↓
Penguatan Tata Kelola Administrasi Berbasis Nilai Ekonomi Syariah

Dengan alur tersebut, penelitian menempatkan transformasi digital sebagai fokus utama, tata kelola administrasi sebagai aspek yang diperkuat, sedangkan amanah dan masalah sebagai perspektif utama analisis. Penggunaan aplikasi E-KINERJA dan E-PRESENSI hanya digunakan sebagai contoh empiris implementasi teknologi digital agar pembahasan tetap sesuai dengan fokus dan judul penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Transformasi Digital dalam Administrasi Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari proses penyesuaian tata kerja administrasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi tidak hanya diarahkan untuk menggantikan proses manual, tetapi juga membantu aparatur dalam mengelola informasi, melaksanakan pekerjaan administratif, menyimpan dokumen, serta mendukung koordinasi dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.

Temuan tersebut diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Febriyani Hilda Dinati selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hukum, yang menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan administrasi sekarang sudah banyak menggunakan teknologi digital dan salah satu penerapan teknologi digital tersebut dengan penggunaan aplikasi E- PRESENSI dan E-KINERJA. Pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual sebagian sudah dilakukan melalui sistem digital. Penggunaan teknologi ini membantu kami dalam mengelola data, dokumen, dan informasi administrasi, dan meningkatkan kedisiplinan pegawai, sehingga pekerjaan menjadi lebih mudah dan teratur. Namun, dalam penggunaannya tetap diperlukan ketelitian dan pemahaman terhadap prosedur, karena data yang dimasukkan harus sesuai dengan dokumen dan kondisi yang sebenarnya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi bagian dari pelaksanaan pekerjaan administrasi sehari-hari. Teknologi dipandang sebagai sarana yang membantu aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengelola informasi yang berkaitan dengan tugas kelembagaan.

Transformasi digital tersebut terlihat dari penggunaan berbagai teknologi yang mendukung aktivitas administrasi. Pemanfaatan sistem digital memberikan perubahan pada cara aparatur melaksanakan pekerjaan, terutama dalam proses pencatatan, pengelolaan informasi, dokumentasi, dan penyelesaian pekerjaan administratif. Dengan adanya dukungan teknologi, proses yang sebelumnya membutuhkan tahapan manual dapat dilakukan melalui sistem yang lebih terstruktur.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Susi Pertamasari selaku Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi:

“Dengan adanya sistem digital, pekerjaan administrasi menjadi lebih terarah. Pencatatan dan pengelolaan data sekarang bisa dilakukan melalui sistem, sehingga tidak semuanya harus dikerjakan secara manual. Dokumen dan informasi juga lebih mudah dikelola dan dicari ketika dibutuhkan. Tetapi kami tetap harus teliti dalam memasukkan data dan mengikuti Standar Operasional Prosedur (atau Standard Operating Procedure) yang sudah ditetapkan.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah media kerja dari manual menjadi digital, tetapi juga memengaruhi pola kerja aparatur. Aparatur dituntut untuk mampu memahami sistem, menyesuaikan diri dengan prosedur digital, serta menjaga ketepatan informasi yang dikelola.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan aplikasi, tetapi mencerminkan perubahan dalam pola kerja administrasi. Aparatur dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan sistem digital, memahami prosedur penggunaan teknologi, serta menjaga ketepatan informasi yang dikelola.

Transformasi digital juga memberikan konsekuensi terhadap pola kerja aparatur. Penggunaan teknologi membutuhkan kemampuan adaptasi, kedisiplinan, serta pemahaman terhadap prosedur. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh tersedianya teknologi, tetapi juga oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam aktivitas administrasi sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi, pemanfaatan teknologi digital telah menjadi bagian dari aktivitas administrasi aparatur di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Aparatur menggunakan perangkat dan sistem digital dalam mendukung pengelolaan pekerjaan dan informasi. Temuan observasi tersebut memperkuat hasil wawancara bahwa transformasi digital telah terintegrasi dalam proses kerja administrasi.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital memiliki posisi sebagai instrumen penguatan tata kelola administrasi. Teknologi memberikan sarana untuk memperbaiki proses kerja, sedangkan aparatur menjadi unsur yang menentukan apakah teknologi tersebut dapat digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.

2. Pemanfaatan Teknologi Digital sebagai Implementasi Transformasi Administrasi

Pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas administrasi Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu bentuk konkret dari proses transformasi digital. Berbagai sistem yang digunakan membantu aparatur dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan administrasi kelembagaan. Dalam konteks penelitian ini, aplikasi E-PRESENSI dan E-KINERJA digunakan sebagai contoh implementasi teknologi digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Susi Pertamasari Selaku Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi, pemanfaatan teknologi digital membantu aparatur dalam melaksanakan pekerjaan administratif.

“Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi E- PRESENSI dan E-KINERJA cukup membantu dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi. Data dan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan dapat dikelola melalui sistem sehingga pekerjaan

menjadi lebih teratur. Kami juga lebih mudah dalam melakukan pencatatan, menyimpan dokumen, dan mencari informasi ketika diperlukan. Meskipun begitu, penggunaan sistem tetap harus dilakukan dengan teliti dan sesuai dengan SOP yang berlaku."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi menjadi bagian dari mekanisme kerja administrasi. Sistem digital membantu aparatur dalam mengelola pekerjaan dan informasi sesuai dengan kebutuhan tugas masing-masing.

Keberadaan kedua sistem tersebut memperlihatkan bahwa proses administrasi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mekanisme manual. Teknologi digunakan sebagai sarana untuk membantu pengelolaan pekerjaan dan informasi secara lebih sistematis. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aplikasi tidak dapat dipisahkan dari proses kerja aparatur yang menggunakannya.

Terkait dengan aplikasi E-PRESENSI, Raka Kurnia Nivriantama Selaku Staf Pelaksana di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi menjelaskan:

"E-PRESENSI membantu Pencatatan Kehadiran otomatis, identitas, pemantauan disiplin kerja, integrasi kinerja, pengajuan cuti dan izin digital, dan pembuatan laporan cepat, dengan adanya E-PRESENSI dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai, efisiensi administrasi dan transparansi data"

Sementara itu, terkait penggunaan aplikasi E-KINERJA, Febrita Putri Wahanani, Selaku staf Pelaksana di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi:

E-KINERJA membantu dalam pelaksanaan administrasi pelaporan kinerja pegawai dan pelaporan tersebut dapat dikelola melalui sistem aplikasi E-KINERJA. Dengan adanya aplikasi tersebut, proses pencatatan dan pengelolaan informasi menjadi lebih terarah. Tetapi kami tetap harus memperhatikan ketelitian dalam memasukkan data dan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa aplikasi E-PRESENSI dan E-KINERJA merupakan bagian dari pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi. Namun, kedua sistem tersebut tidak ditempatkan sebagai fokus utama penelitian. Keduanya hanya menjadi contoh konkret mengenai bagaimana transformasi digital diimplementasikan dalam aktivitas administrasi Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi.

Aplikasi E- PRESENSI dan E-KINERJA dalam penelitian ini tidak dianalisis berdasarkan fitur teknis maupun dibandingkan berdasarkan tingkat keunggulan masing-masing aplikasi. Keduanya ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem transformasi digital yang membantu pekerjaan dan meningkatkan kedisiplinan pegawai.

Penggunaan teknologi juga menuntut adanya ketelitian dalam pengelolaan data. Informasi yang dimasukkan ke dalam sistem harus sesuai dengan dokumen dan kondisi administrasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, proses digitalisasi justru meningkatkan pentingnya tanggung jawab aparatur dalam memastikan kualitas informasi.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital merupakan proses yang melibatkan keterkaitan antara teknologi, manusia, dan prosedur kerja. Aplikasi berfungsi sebagai instrumen, sedangkan kualitas hasil administrasi tetap ditentukan oleh bagaimana aparatur menjalankan tugas dan menggunakan teknologi tersebut.

3. Dampak Transformasi Digital terhadap Penguatan Tata Kelola Administrasi

Pemanfaatan teknologi digital memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola administrasi di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Kontribusi tersebut terlihat terutama pada aspek keteraturan proses kerja, pengelolaan informasi, dokumentasi, dan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan administratif.

Hasil wawancara dengan Febriyani Hilda Dinati selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum menunjukkan adanya perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan administrasi setelah pemanfaatan teknologi digital.

"Setelah penggunaan teknologi digital, proses pekerjaan administrasi menjadi lebih teratur dibandingkan sebelumnya. Beberapa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual sekarang dapat dilakukan melalui sistem. Pengelolaan data dan dokumen juga menjadi lebih mudah karena informasi dapat disimpan dan dikelola secara lebih sistematis. Meskipun demikian, kami tetap harus mengikuti prosedur dan memastikan data yang dikerjakan sudah benar."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital membantu aparatur melaksanakan pekerjaan dengan alur yang lebih sistematis. Teknologi memberikan dukungan terhadap pengelolaan informasi dan penyelesaian pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan proses manual.

Dari aspek efektivitas, teknologi membantu aparatur menyelesaikan pekerjaan dengan proses yang lebih terstruktur. Pengelolaan informasi melalui sistem digital dapat mengurangi tahapan pekerjaan yang dilakukan secara manual sehingga pekerjaan administratif dapat dilakukan secara lebih terarah.

Dari aspek transparansi, penggunaan sistem digital mendukung keteraturan dokumentasi dan pengelolaan informasi. Data dan proses administrasi yang tersimpan dalam sistem lebih mudah ditelusuri dibandingkan dengan proses yang sepenuhnya mengandalkan dokumen manual. Kondisi tersebut dapat mendukung proses pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Hasil wawancara dengan Raka Kurnia Nivriantama memperkuat temuan tersebut:

"Dengan adanya sistem digital, data dan dokumen yang sudah dikelola menjadi lebih mudah untuk ditelusuri ketika dibutuhkan. Informasi yang berkaitan dengan pekerjaan juga lebih tertata sehingga kami lebih mudah mengetahui dan mengecek kembali data yang sudah dikerjakan. Hal ini membantu pekerjaan administrasi menjadi lebih teratur."

Sementara itu, dari aspek akuntabilitas, pemanfaatan teknologi membantu menciptakan dokumentasi yang lebih sistematis. Administrasi yang terdokumentasi dengan baik dapat mempermudah proses pemeriksaan dan pertanggungjawaban pekerjaan. Febrita Putri Wahanani menyampaikan:

"Dokumentasi pekerjaan menjadi lebih tertata karena data dan proses pekerjaan dapat dicatat melalui sistem. Ketika ada pemeriksaan atau diperlukan kembali, kami bisa melihat data dan dokumen yang sudah dikerjakan. Jadi, pekerjaan yang dilakukan lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan karena ada catatan administrasinya."

Namun demikian, teknologi hanya menjadi sarana pendukung. Akuntabilitas tetap bergantung pada kesediaan aparatur untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Dengan demikian, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dapat dipahami sebagai indikator pendukung yang memperlihatkan adanya penguatan tata kelola administrasi. Ketiganya bukan merupakan fokus utama penelitian, tetapi membantu menunjukkan manfaat transformasi digital dalam pelaksanaan administrasi.

4. Transformasi Digital dalam Perspektif Amanah

Transformasi digital dalam administrasi publik memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip amanah karena penggunaan teknologi melibatkan pengelolaan data, informasi, kewenangan, dan tanggung jawab kelembagaan. Dalam perspektif ekonomi syariah, teknologi tidak hanya dinilai dari kemampuan mempercepat pekerjaan, tetapi juga dari bagaimana teknologi tersebut digunakan secara benar dan bertanggung jawab.

a. Tanggung Jawab

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital menuntut aparaturnya untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap pekerjaan administrasi. Aparatur tidak hanya bertugas menjalankan sistem, tetapi juga bertanggung jawab terhadap data dan informasi yang dihasilkan. Hasil wawancara dengan Susi Pertamasari selaku Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi menunjukkan:

“Dalam menggunakan sistem digital, kami harus bertanggung jawab terhadap data yang kami masukkan. Sebelum data diproses atau disimpan, harus diperiksa terlebih dahulu agar sesuai dengan dokumen/informasi yang ada. Karena kalau ada kesalahan dalam penginputan, nantinya bisa berpengaruh pada pekerjaan administrasi berikutnya. Jadi, penggunaan teknologi tetap membutuhkan ketelitian dan tanggung jawab dari masing-masing petugas.”

Tanggung jawab tersebut terlihat dari kebutuhan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem sesuai dengan dokumen yang tersedia. Kesalahan dalam penginputan atau pengelolaan informasi dapat memengaruhi proses administrasi berikutnya. Oleh karena itu, penggunaan teknologi membutuhkan ketelitian dan kesadaran bahwa setiap informasi yang dikelola merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan.

Dalam perspektif amanah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dapat menjadi sarana untuk memperkuat rasa tanggung jawab aparaturnya. Teknologi memberikan mekanisme kerja, sedangkan nilai amanah memberikan dasar moral bagi aparaturnya untuk melaksanakan mekanisme tersebut dengan benar.

b. Kejujuran

Kejujuran merupakan bagian penting dalam pengelolaan administrasi digital. Data yang dimasukkan dan dikelola melalui sistem harus menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Susi Pertamasari selaku Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi menjelaskan:

“Dalam pengelolaan data melalui sistem digital, kami harus memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan dokumen dan keadaan yang sebenarnya. Data tidak boleh dibuat atau diubah sembarangan karena informasi tersebut berkaitan dengan pekerjaan administrasi. Jadi, kejujuran sangat penting supaya data yang ada dalam sistem benar dan dapat dipercaya.”

Pengelolaan data melalui sistem digital dengan demikian menuntut adanya integritas dari pengguna. Sistem dapat membantu proses pencatatan, tetapi kebenaran informasi tetap sangat bergantung pada aparatur yang memasukkan dan mengelolanya.

Dalam perspektif amanah, kejujuran menjadi fondasi penting karena kepercayaan terhadap administrasi digital bergantung pada kebenaran informasi yang terdapat di dalam sistem.

c. Kepercayaan

Transformasi digital juga memiliki hubungan dengan upaya menjaga kepercayaan terhadap lembaga. Pengelolaan administrasi yang tertib dan terdokumentasi dapat memberikan dasar yang lebih kuat bagi organisasi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.

Hasil wawancara dengan Febriyani Hilda Dinati Selaku Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum menunjukkan:

"Pengelolaan administrasi melalui sistem digital membuat data dan informasi lebih mudah dikelola dan ditelusuri. Karena itu, kami harus menjaga agar informasi yang dimasukkan benar dan sesuai dengan dokumen. Kalau data dikelola dengan baik dan sesuai prosedur, pekerjaan administrasi menjadi lebih dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan."

Kepercayaan tidak hanya dibangun melalui teknologi, tetapi melalui kombinasi antara sistem yang baik dan perilaku aparatur yang bertanggung jawab. Ketika teknologi digunakan sesuai prosedur dan informasi dikelola secara benar, proses administrasi menjadi lebih mudah dipertanggungjawabkan.

d. Kepatuhan

Penggunaan teknologi digital juga menuntut kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang berlaku. Aparatur perlu mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam pengelolaan administrasi serta menggunakan sistem sesuai kewenangan. Raka Kurnia Nivriantama menjelaskan:

"Dalam menggunakan teknologi digital, kami tetap harus mengikuti SOP dan prosedur administrasi yang sudah ditetapkan. Sistem memang membantu pekerjaan menjadi lebih mudah, tetapi setiap proses tetap harus dilakukan sesuai tahapan dan kewenangan masing-masing. Kami juga harus memastikan bahwa data yang dikelola sesuai dengan ketentuan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses administrasi."

Kepatuhan menjadi penting karena sistem digital pada dasarnya hanya dapat berfungsi dengan baik apabila pengguna menjalankan tahapan kerja sesuai prosedur.

Dalam perspektif amanah, kepatuhan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital yang disertai kepatuhan menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya menghasilkan perubahan teknis, tetapi juga dapat mendukung budaya administrasi yang lebih disiplin.

5. Transformasi Digital dalam Perspektif Masalah

Selain amanah, transformasi digital di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi dapat dianalisis melalui prinsip masalah. Prinsip ini menekankan bahwa suatu aktivitas harus memberikan manfaat dan kemudahan serta mendukung terciptanya kebaikan yang lebih luas.

a. Kemanfaatan

Pemanfaatan teknologi memberikan manfaat dalam pelaksanaan pekerjaan administratif. Sistem digital membantu aparatur mengelola informasi dan pekerjaan secara lebih terstruktur. Febriyani Hilda Dinati menyampaikan:

"Penggunaan teknologi digital memberikan manfaat dalam pekerjaan administrasi karena beberapa pekerjaan menjadi lebih mudah dilakukan dan lebih teratur. Data dan informasi dapat dikelola melalui sistem sehingga membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan dan mengurangi pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual."

Keberadaan aplikasi E-PRESENSI dan E-KINERJA sebagai bagian dari implementasi teknologi digital memperlihatkan bahwa digitalisasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi tertentu. Namun, kemanfaatan tersebut tidak terletak semata-mata pada keberadaan aplikasi, melainkan pada fungsi teknologi dalam membantu proses kerja organisasi.

b. Kemudahan

Salah satu manfaat transformasi digital adalah memberikan kemudahan bagi aparatur dalam menjalankan pekerjaan.

Hasil wawancara dengan Akhmad Fanny Fadhillah menunjukkan:

"Dengan adanya teknologi digital, pekerjaan administrasi menjadi lebih mudah karena beberapa proses yang sebelumnya dilakukan secara manual sekarang dapat dilakukan melalui sistem. Pengelolaan data dan dokumen juga lebih mudah, terutama ketika informasi tersebut diperlukan kembali untuk menyelesaikan pekerjaan."

Kemudahan juga dapat dilihat dari proses pencarian dan pengelolaan informasi yang lebih terstruktur. Hal tersebut dapat membantu aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pencarian dokumen secara manual.

Kemudahan yang dihasilkan teknologi menunjukkan adanya dimensi masalah karena teknologi memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan mengurangi beban administratif yang tidak perlu.

c. Efisiensi

Transformasi digital juga berpotensi meningkatkan efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga, Susi Pertamasari menyatakan:

"Penggunaan teknologi digital membantu menghemat waktu dan tenaga dalam menyelesaikan pekerjaan administrasi. Beberapa proses yang sebelumnya membutuhkan waktu lebih lama karena dilakukan secara manual sekarang dapat dilakukan melalui sistem. Dengan begitu, pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan kami dapat lebih fokus pada pekerjaan administrasi lainnya."

Efisiensi dalam penelitian ini tidak semata-mata dipahami sebagai penghematan waktu, tetapi juga sebagai kemampuan teknologi mengurangi pekerjaan administratif yang berulang dan mempermudah koordinasi serta pengelolaan informasi.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dapat memiliki nilai masalah apabila efisiensi yang dihasilkan benar-benar mendukung kualitas pelaksanaan tugas.

d. Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Kemanfaatan transformasi digital pada akhirnya dapat dilihat dari kontribusinya terhadap peningkatan kualitas tata kelola administrasi. Susi Permatasari menjelaskan:

“Dengan adanya teknologi digital, administrasi menjadi lebih tertata karena data dan dokumen dapat dikelola melalui sistem. Pekerjaan juga lebih mudah dipantau dan ketika ada data yang diperlukan, dapat dicari kembali dengan lebih mudah. Menurut kami, penggunaan teknologi membantu meningkatkan keteraturan dan kualitas pekerjaan administrasi.”

Pengelolaan informasi yang lebih sistematis, dokumentasi yang lebih teratur, dan proses kerja yang lebih terstruktur dapat menjadi dasar bagi peningkatan kualitas administrasi.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip masalah karena tujuan pemanfaatan teknologi diarahkan pada terciptanya manfaat yang lebih luas bagi organisasi dan pihak yang berkepentingan.

6. Keterkaitan Amanah dan Masalah dalam Penguatan Tata Kelola Administrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa amanah dan masalah merupakan dua prinsip yang saling melengkapi dalam menganalisis transformasi digital. Amanah memberikan dimensi mengenai bagaimana teknologi digunakan, sedangkan masalah memberikan orientasi mengenai manfaat yang dihasilkan dari penggunaan teknologi tersebut.

Temuan wawancara memperlihatkan bahwa aparatur tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga membutuhkan sikap bertanggung jawab, jujur, patuh terhadap prosedur, serta mampu menjaga kepercayaan dalam mengelola informasi administrasi.

Pada saat yang sama, teknologi yang digunakan harus memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas. Hasil wawancara mengenai kemudahan, efisiensi, dan keteraturan pekerjaan menunjukkan bahwa digitalisasi dapat memberikan kemaslahatan apabila digunakan sesuai kebutuhan organisasi.

Dengan demikian, transformasi digital yang ideal dalam perspektif ekonomi syariah adalah transformasi yang menggabungkan integritas dalam proses dan kemanfaatan dalam hasil. Aparatur harus menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, jujur, patuh, dan menjaga kepercayaan, sementara organisasi perlu memastikan bahwa teknologi tersebut memberikan kemudahan, efisiensi, dan peningkatan kualitas tata kelola.

Pembahasan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa transformasi digital di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi sebaiknya dipahami sebagai proses perubahan tata kerja, bukan sekadar penggunaan aplikasi. E-PRESENSI dan E-KINERJA memberikan contoh konkret mengenai pemanfaatan teknologi dalam aktivitas administrasi, tetapi keduanya tidak menjadi pusat analisis penelitian.

Kontribusi transformasi digital terhadap tata kelola ditentukan oleh bagaimana teknologi tersebut diintegrasikan ke dalam proses kerja organisasi. Teknologi membantu menciptakan proses administrasi yang lebih terstruktur, mendukung pengelolaan informasi, dan mempermudah dokumentasi (Hamim & Hafis, 2026).

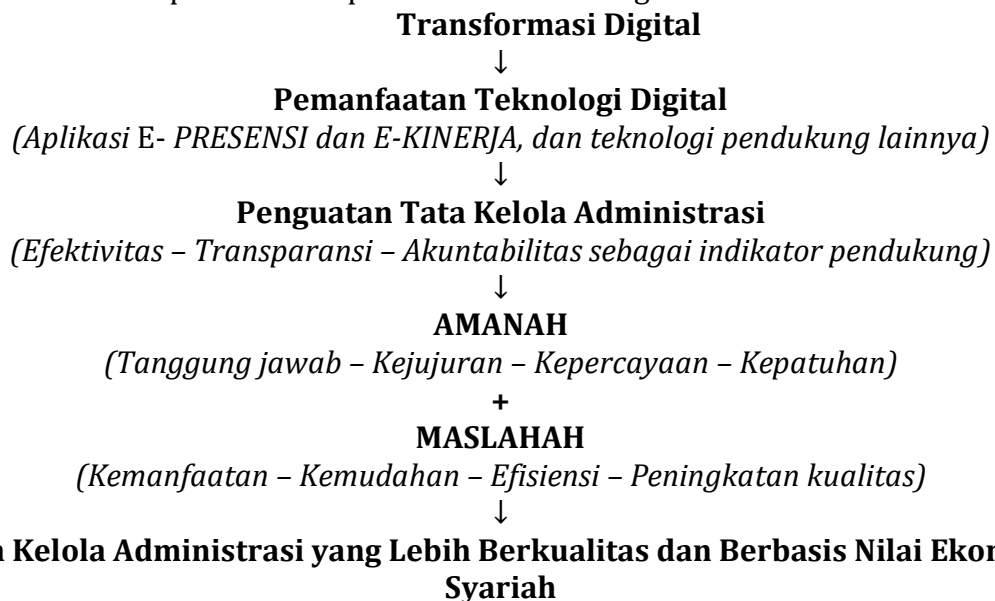
Dalam perspektif amanah, transformasi digital menuntut aparatur untuk bertanggung jawab terhadap data dan informasi yang dikelola, menjaga kejujuran, mempertahankan kepercayaan, serta mematuhi prosedur yang berlaku. Sementara itu,

perspektif masalah menilai transformasi digital berdasarkan manfaat yang dihasilkan, terutama kemudahan, efisiensi, dan peningkatan kualitas administrasi (Ramadhani Alfin Habibie et al., 2025).

Dengan demikian, transformasi digital dalam administrasi publik tidak cukup dipahami sebagai perubahan dari sistem manual menuju sistem digital. Transformasi tersebut harus menghasilkan perubahan yang memberikan manfaat sekaligus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Model Temuan Penelitian

Alur temuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:



Dengan model tersebut, penggunaan aplikasi E- PRESENSI dan E-KINERJA tetap proporsional. Keduanya hanya menjadi contoh implementasi teknologi dalam transformasi digital, sedangkan fokus penelitian tetap pada peran transformasi digital dalam penguatan tata kelola administrasi Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi melalui perspektif amanah dan masalah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Transformasi Digital dalam Penguatan Tata Kelola Administrasi Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi: Kajian Prinsip Amanah dan Masalah dalam Perspektif Ekonomi Syariah, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital memiliki peran penting dalam mendukung perubahan dan penguatan tata kelola administrasi di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Transformasi digital tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan aplikasi atau peralihan dari sistem manual ke sistem digital, tetapi sebagai perubahan pola kerja yang mencakup pengelolaan informasi, dokumentasi, koordinasi, serta pelaksanaan pekerjaan administrasi yang lebih terstruktur.

Pemanfaatan berbagai teknologi digital dalam administrasi, termasuk aplikasi E- PRESENSI dan E-KINERJA, menunjukkan bentuk konkret implementasi transformasi digital di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Namun, kedua aplikasi tersebut hanya menjadi bagian dari ekosistem digitalisasi administrasi dan bukan menjadi fokus utama penelitian. Keberadaan teknologi memberikan dukungan terhadap keteraturan proses kerja, pengelolaan informasi, dokumentasi, serta kemudahan dalam

penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian, penguatan tata kelola tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dalam mengintegrasikan teknologi dengan prosedur dan tanggung jawab administrasi.

Dalam perspektif amanah, transformasi digital memperkuat tuntutan terhadap tanggung jawab, kejujuran, kepercayaan, dan kepatuhan aparatur dalam menjalankan pekerjaan. Pengelolaan data dan informasi melalui sistem digital merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan yang harus dilakukan secara benar, teliti, dan sesuai dengan ketentuan. Teknologi dapat menyediakan sistem dan mekanisme kerja, tetapi nilai amanah menjadi landasan moral yang memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan tidak disalahgunakan.

Sementara itu, dalam perspektif masalah, transformasi digital memberikan manfaat berupa kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan, pengelolaan informasi yang lebih terstruktur, efisiensi waktu dan tenaga, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas tata kelola administrasi. Kemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki nilai masalah apabila teknologi benar-benar digunakan untuk mendukung kebutuhan organisasi dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas kelembagaan.

Dengan demikian, amanah dan masalah merupakan dua prinsip yang saling melengkapi dalam memahami transformasi digital di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi. Amanah menekankan bagaimana teknologi digunakan, yaitu dengan tanggung jawab, kejujuran, kepercayaan, dan kepatuhan, sedangkan masalah menekankan manfaat yang dihasilkan, yaitu kemudahan, efisiensi, dan peningkatan kualitas administrasi. Efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penelitian ini berperan sebagai indikator pendukung yang menunjukkan adanya penguatan tata kelola, tetapi bukan menjadi fokus utama analisis.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam administrasi publik akan lebih bermakna apabila tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan efisiensi, tetapi juga dilandasi nilai-nilai etis dan kemanfaatan. Dalam perspektif ekonomi syariah, transformasi digital yang ideal adalah transformasi yang mampu mengintegrasikan amanah sebagai landasan perilaku aparatur dan masalah sebagai orientasi manfaat, sehingga menghasilkan tata kelola administrasi yang lebih tertib, bertanggung jawab, bermanfaat, dan berkualitas di Sekretariat KPU Kabupaten Banyuwangi.

Daftar Pustaka

- Almalki, S. (2016). Integrating Quantitative and Qualitative Data in Mixed Methods Research—Challenges and Benefits. *Journal of Education and Learning*, 5(3), 288. <https://doi.org/10.5539/jel.v5n3p288>
- Amalia, J. D. N. (n.d.). *Universitas Abdurachman Saleh Fisip JURNAL DINY NUR AMALIA*.
- Apriliawati, D. (2020). Diary Study sebagai Metode Pengumpulan Data pada Riset Kuantitatif: Sebuah Literature Review. *Journal of Psychological Perspective*, 2(2), 79–89. <https://doi.org/10.47679/jopp.022.12200007>
- Arfi, R. R., Husna, K., Yandra, A., & Rianita, D. (2025). *Polarisasi Problematika Data Pemilih Tetap (DPT) Dan Dampaknya Pada Tata Kelola Pemerintahan*.
- Aveling, E.-L., Gillespie, A., & Cornish, F. (2015). A qualitative method for analysing multivoicedness. *Qualitative Research*, 15(6), 670–687. <https://doi.org/10.1177/1468794114557991>

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 01, Nomor 01](#) Agustus 2026

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

- Azhar, I. Y., Robby Darwis Nasution, & Jusuf Harsono. (2026). ANALISIS PERBANDINGAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM TRANSFORMASI PILKADA: PELUANG DAN TANTANGAN. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 7(1), 26–43. <https://doi.org/10.29103/jspm.v7i1.24830>
- Dompak, T., Firiansyah, I., & Ahdarrijal, Y. (2026). *TRANSFORMASI PEMILU INDONESIA MENUJU DIGITAL DEMOCRACY: SUATU KAJIAN LITERATUR*. 8.
- Dwi Cahyani, A. D., Oktaviana, U. K., & Azizuddin, I. (2022). Analisis Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Syariah dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2785. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6768>
- Febriansyah, R., & Husnayanti, A. (n.d.). *Keamanan Sistem Informasi Pemilu Melalui Computer Security Incident Response Team (Csirt) Pemilu Serentak 2024*.
- Febrina, S., & Manurung, L. (2022). Penerapan E-Parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Sospol*, 8(2), 169–182. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.23556>
- Firdaus, N. S. A., & Fatimatuzzahro, F. (2026). PENERAPAN PRINSIP 5C SEBAGAI DASAR PENILAIAN KELAYAKAN NASABAH DALAM PEMBIAYAAN KPR DI BSN KCP PROBOLINGGO UNTUK MEMINIMALKAN RISIKO PEMBIAYAAN. *Currency (Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)*, 5(1), 317–337.
- Hamim, S., & Hafis, R. I. A. (2026). *Implementasi Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2025*. 4(4).
- Hana, M. Z., & Prabowo, H. Y. (2025). Implementing Fraud Prevention and Detection Strategies in Indonesia’s National Health Insurance: A Case Study at BPJS Kesehatan Yogyakarta. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 16(1), 65–85. <https://doi.org/10.18592/taradhi.v16i1.16732>
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Karimah, H., Akbariani Ahmad, A., & Athallah Akbar, M. A. (2025). Empowering The Informal Economy Through Islamic Social Finance: Insights from Islamic Economic Principles for Inclusive Development. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 16(1), 14–33. <https://doi.org/10.18592/taradhi.v16i1.16301>
- Kariuki, P., Ofusori, L. O., & Goyayi, M. L. J. (2025). Internet of Things on Banking Processes in South Africa: A Systematic Reflection on Innovations, Opportunities and Challenges. *Digital Business*, 5(1), 100097. <https://doi.org/10.1016/j.digbus.2024.100097>
- Kurniawan, Z. A., & Faizah, I. (2022). ANALISIS PENGUNGKAPAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN PADA LAPORAN KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 3(1), 63. <https://doi.org/10.24042/al-mashrof.v3i1.12161>
- Sofiah, S. Kurniawan, Z. A., & Korib, M. (2026). ECO-QUR’ANIC PESANTREN AND ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP: EVIDENCE FROM BAITUL HIKMAH TEMPUREJO JEMBER. *Journal of Economic Studies*, 10(1).
- Mardiah, A., & Anugrah, H. (2020). *PENGARUH ORIENTASI BELANJA, KEPERCAYAAN, DAN PENGALAMAN PEMBELIAN TERHADAP MINAT BELI ULANG SECARA ONLINE*.

- Musari, K. (2020). QRIS, behavioral economics, dan literasi keuangan digital. *Buletin Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)*, Edisi XXV, February, 6-8
- Mujalipah, M., & Hidayat, M. R. (2025). Beyond The Intention of Generation Z to Work at Islamic Banks: Case of Universitas Islam Negeri Antasari and Universitas Lambung Mangkurat Students. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 15(2), 84–102. <https://doi.org/10.18592/taradhi.v15i2.14804>
- Nang, M. I. S. (n.d.). TRANSFORMASI DIGITAL KPU: ANALISIS MANFAAT IMPLEMENTASI SIAKBA DALAM REKRUTMEN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU 2024 DI KABUPATEN BANGGAI.
- Nang, M. I. S., Hattab, S., & Waris, I. (2025). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc dalam Proses Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(3), 573–588. <https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.738>
- Njie, B., & Asimiran, S. (2014). Case Study as a Choice in Qualitative Methodology. *IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJME)*, 4(3), 35–40. <https://doi.org/10.9790/7388-04313540>
- Okumuş, H. Ş. (2024). Performance assessment of participation banks based on Maqasid al-Shari'ah framework: Evidence from Türkiye. *Borsa Istanbul Review*, 24(4), 806–817. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2024.04.011>
- Pranata, Y. A., & Amaranti, R. (2021). Rancangan Strategi Pemasaran Media Sosial Menggunakan Model SOSTAC. *Jurnal Riset Teknik Industri*, 1(2), 110–120. <https://doi.org/10.29313/jrti.v1i2.397>
- Putri, A. (n.d.). Analisis Pengelolaan Arsip Pada Unit Sumber Daya Manusia dan Umum di Ombudsman Republik Indonesia.
- Rahman, A., Jennah, L., & Khalilah, S. (n.d.). ANALISIS KETENTUAN PENETAPAN HARGA MENURUT IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENETAPAN HARGA TAHU DI PABRIK TAHU BAPAK DURDI LEMPONG KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG.
- Rahayu, N. W. I., Poernomo, D., Mursyidah, I. L., & Jannah, E. S. W. (2024). An Islamic point of view of cryptocurrency investment: Generations z fear of missing out (FOMO) and their personal traits as traders. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(5), 1880-1905.
- Rahmawanti, Z. P., Aditya, I., & Aryani, L. (2026). KEBIJAKAN KPU DALAM REKRUTMEN BADAN AD HOC PEMILIHAN UMUM (PEMILU) TAHUN 2024. 9(1).
- Ramadhani Alfin Habibie, Ahmad Ahmad, Dody Wahyudi, Muhammad Aditya, Muhamad Hobiri, & M. Syahbintang. (2025). Tantangan KPU di Era Digital: Antara Transparansi dan Keamanan Data di Kota Palangka Raya. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 2(4), 61–70. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i4.2683>
- Ramadhani, B. A. (n.d.). Analisis Agenda Setting Program Berobat Gratis Tanpa Batas (Berantas) Kabupaten Situbondo Dengan Pendekatan Model Multiple Streams Framework.
- Rezkiawan, M., Pardi, M., Rustan, M. A., & Asdir, M. (n.d.). PENGGUNAAN ALAT DIGITAL DALAM PENGELOLAAN ARSIP KEUANGAN DAN RUANG ASPIRASI DI KANTOR DPRD KOTA PAREPARE. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Rosalina, D., & Majid, M. S. A. (2025). Manajemen Kinerja UKM di Era Transformasi Digital: Systematic Literature Review Antecedent, Moderator dan Mediator. 05(02).

- Setianingrum, N., Puspitasari, I. D., & Kurniawan, Z. A. (2024). The Influence Of Motivation, Entrepreneurial Creativity And Business Innovation Towards The Interest Of Generation Z Students In Startup Business In Jember District. *Majalah Ilmiah Dian Ilmu*, 23(2), 166–180. <https://doi.org/10.37849/midi.v23i2.389>
- Siahaan, S. D. N., & Sitompul, H. P. (2021). ANALISIS PENGARUH ORIENTASI BELANJA DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN TERHADAP MINAT BELI. *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Prima*, 3(1), 17–28. <https://doi.org/10.34012/jebim.v3i1.1685>
- Sofiah, S. (2018). Konsep Uang Dalam Al-Qur'an (Telaah Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Ibnu Katsir). *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 8(3), 15-32.
- Sri Dwi Puji Lestari, Mohammad Abil Faroj Al Jawawi, Nur Azizah, Akiko Brando Yuniardi, & Ahmad Heru Romadhon. (2025). Perspektif Hukum Administrasi Negara dalam Konteks Pemusnahan Arsip di Komisi Pemilihan Umum. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 291–304. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.2283>
- Sudirjo, F., Lubis, S. R., Permana, R. M., Rukmana, A. Y., & Mesra, R. (2023). Menuju Pemahaman yang Tepat Tentang Strategi Pemasaran: Tinjauan dan Agenda Penelitian Berbasis Bibliometrik-Mesin Terintegrasi. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, 1(03), 204–216. <https://doi.org/10.58812/smb.v1i03.218>
- Sungkar, A. R., Sudiro, A. D., Ramadhan, D. A., & Anindita, N. (2025). *PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MANAJEMEN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA*. 9(12).